

Post-Islamisme? Mobilisasi Politik Partai Islam di Bali Dalam Pemilihan Umum Legislatif

Ilham Azhimi Pradhananta¹, Bandiyah², Muhammad Ali Azhar³

^{1,2,3})Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: Ilham.azhimi5@gmail.com¹, dyah_3981@yahoo.co.id², aliazhar23mr@yahoo.co.id³

ABSTRACT

Islamic parties as minority parties in Bali have their own challenges based on the results of the 2004-2019 legislative elections. The purpose of this study is to find out the inhibiting factors for political parties lead to low election vote results. This study uses Stefano Bartolini's theory and Asef Bayat's post-Islamism ideology. The research method used comparative qualitative methods using primary data and secondary data to identify and describe the various attitudes of Islamic political parties in their dynamics. The results of this study show: First, Islamic political parties in Bali are still institutionally weak, thus hinders political party to practice political mobilization effectively. Second, Islamic political parties in Bali nowadays are relying on figures with a strong mass base network from Islamic foundations such as PKS and PPP. Third, the political party conflicts that occurred internally, greatly influenced the results of the 2019 Denpasar City Election.

Keywords: Political mobilization, Islamic political parties, legislative elections, social cleavage

1. PENDAHULUAN

Dari data hasil perhitungan suara DPRD Kota Denpasar pada pemilu legislatif tahun 2004-2019, dapat dilihat bahwa beberapa partai mengalami peningkatan setiap tahunnya namun sebagai representatif parpol Islam, partai-partai tersebut masih memperoleh suara jauh dibawah sekitar empat persen dari total keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Denpasar yang berjumlah 415.642 pada Pemilu tahun 2019. Semua suara parpol Islam tersebut jika dijumlah hasilnya bahkan masih sangat jauh atau hanya sebelas persen dari keseluruhan penduduk muslim yang berjumlah 152.192 jiwa berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kota Denpasar. Terdapat dua kemungkinan atas kemana

sisanya dari delapan puluh sembilan persen hak suara tersebut, yang pertama bisa tidak digunakan atau golput, sedangkan yang kedua adalah kemungkinan masuk kedalam perhitungan suara dari partai politik Nasionalis. Menurut Sudirman Tebba (2001) pasca orde baru sebuah partai politik disebut partai Islam apabila nama dan asasnya mengandung unsur Islam, ataupun lambangnya mengandung ciri Islami. Jika dilihat dalam konteks saat ini partai politik di Indonesia yang sampai sekarang masih konsisten menerapkan Islam sebagai asas atau ideologi politiknya hanyalah tiga partai politik antara lain; Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Adapun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN), jika dilihat dari perspektif konstitusi partai, kedua partai

tersebut tidak dikategorikan sebagai partai politik Islam, namun mencerminkan sebatas partai berbasis massa Islam. Berdasarkan pengertian sebelumnya, tidak semua partai politik Islam memiliki karakteristik umum untuk dapat dikatakan parpol Islam seperti mengimplementasi asas dan syariat Islam, memiliki platform yang Islami, dan memakai lambang atau simbol ciri khas agama Islam. Selain itu para anggota juga mengadaptasi nilai-nilai beserta cita-cita yang sama guna memperoleh kekuasaan politik ataupun merebut kedudukan dan kepentingan politik melalui jalan konstitusional, dan terakhir menarik partisipan rakyat dalam demokrasi melalui pandangan yang sama (Tebba, 2001).

Dengan begitu perlu diketahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat kemajuan dari partai politik berideologi Islam terutama yang ada di Bali seperti PKS, dan PBB sedangkan PPP dikarenakan sedang tidak aktif maka partai tersebut tidak termasuk dalam penelitian. Berawal dari latar belakang tersebut, penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih lanjut adalah bagaimana mobilisasi dari partai politik berideologi Islam berkaca pada Rendahnya elektabilitas partai berdasarkan hasil perolehan suara legislatif DPRD Kota Denpasar dalam pemilihan umum legislatif tahun 2004 hingga 2019. Mobilisasi politik seperti apa yang diimplementasi oleh parpol dalam menarik massa para pendukungnya. Kajian ini kemudian dilihat melalui sudut pandang mobilisasi politik yang berbeda dari wilayah dengan mayoritas penduduk Islam, dan

ideologi agama yang dibawa dengan judul "Post-Islamisme? Mobilisasi Politik Partai Islam Di Bali Dalam Pemilihan Umum Legislatif".

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Mobilisasi Politik

Mobilisasi Politik menurut Stefano Bartolini dalam bukunya *The Political Mobilization of the European Left, 1860-1980* terdapat kutipan "Political Mobilization was a multifaceted process of citizen involvement in the (post-) nation and industrial phases of modernization". Kutipan tersebut menjelaskan bahwa mobilisasi digambarkan sebagai berbagai macam proses dengan keterlibatan masyarakat dalam suatu usaha rekrutmen massa dengan tujuan yang sama. Kemudian Mobilisasi dengan bentuk struktural terlihat pada masa industrialisasi dan modernisasi di eropa.

Di Eropa sejak abad kesembilan belas terjadi mobilisasi pekerja secara besar-besaran yang dilakukan guna merekrut banyak pekerja dan berujung pada munculnya industri-industri dengan jumlah yang besar di Eropa. Stefano berpendapat bahwa mobilisasi politik adalah berbagai proses yang digunakan oleh individu maupun kelompok, organisasi ataupun partai dalam merekrut partisipannya dengan tujuan untuk mendapat dukungan khusus dalam sebuah pemilihan. Partisipan disini memiliki peran dan fungsi antara lain sebagai basis massa dalam mendukung konstruksi rangkaian kebijakan yang akhirnya bertujuan untuk dapat diterima

oleh masyarakat dengan skala yang luas (Bartolini, 2007:11).

Teori yang menjadi acuan penelitian ini adalah teori Mobilisasi Politik oleh Stefano Bartolini dikarenakan dalam hal ini sudah terlihat bahwa mobilisasi politik yang dijalankan oleh parpol berbasis Islam di Bali sudah tidak dapat bersaing secara efektif dalam menarik para partisipan pendukungnya, hal ini dapat terlihat dari rendahnya perolehan suara pada pemilu legislatif dari tahun 2004 hingga 2019. Dengan begitu diperlukannya jenis usaha baru dalam merekrut massa dengan jumlah yang signifikan.

Menurut Stefano, "political and even electoral mobilization was performed by governments, state bureaucracy, charismatic leadership, and so on. In these cases, parties and interest organizations competed with other established agencies that preceded them" (Bartolini, 2007:13). Hal ini menyatakan bahwa mobilisasi menjadi sangatlah penting dalam kompetisi perpolitikan antara bermacam-macam kelompok sosial yang ada. Pengorganisasian di dalam masyarakat adalah salah satu contoh bentuk mobilisasi politik.

Teori Post Islamisme

Teori Pos-Islamisme adalah teori yang dikemukakan oleh Asef Bayat, beliau adalah seorang profesor di Universitas Illinois Amerika dan juga kepala Kajian Masyarakat dan Budaya Timur Tengah Modern di Universitas Leiden di Belanda. Pos-Islamisme menurutnya adalah sebuah

pandangan baru mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah yang diekspresikan terhadap ruang publik, budaya pemuda, politik mahasiswa, dan pemikiran agama. Pos-Islamisme di negara Iran pada mulanya digunakan untuk melihat perkembangan kontemporer Islam melalui berbagai kontes seperti budaya dan sosial politik. Istilah ini kemudian digunakan oleh beberapa pengamat dan akademisi untuk meneliti perkembangan gerakan militan di dunia ataupun negara Islam (Bayat, 2011:432).

Konsep Pembilahan Sosial

Penjelasan dari sisi struktur sosial mengenai pembilahan struktur dan kesinambungan sistem kepartaian itu sendiri datang dari Stein Rokkan. Rokkan mencoba memahami perkembangan sistem kepartaian yang ada di Eropa melalui sudut konflik masyarakat yang dikenal sebagai *social cleaveges*. Awal pertentangan ini terjadi karena perbedaan kepentingan yang dihasilkan oleh antara lain : proses modernisasi makro, kemudian moneterisasi, urbanisasi, sekularisasi, standarisasi budaya, industrialisasi, kontrol administrasi, dan sentralisasi. Menguatnya garis oposisi akan menyebabkan konflik atas kebijakan publik sekaligus sentralisasi pengambilan keputusan politik yang terjadi. Tindakan yang pada akhirnya dihasilkan akan memiliki ketergantungan pada pengembangan tujuan tertentu organisasi yang dijalankan masyarakat (Lipset, Rokkan 1967).

3. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode komparatif deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda (Sugiyono, 2012:57).

Dalam penelitian ini akan dianalisa menggunakan tinjauan deskriptif mengenai faktor partai politik berbasis Islam di Bali tidak mendapatkan jumlah suara legislatif yang signifikan dalam pemilu legislatif. Penelitian ini juga akan menggunakan sumber literasi yang berasal dari dokumen, majalah, surat kabar ataupun jurnal. Sedangkan untuk sumber berbentuk lisan diperoleh melalui hasil wawancara pengurus dari partai politik Islam yang ada di Bali.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PKS di Bali

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik yang menggunakan asas Islam di Indonesia dan beranjak melalui gerakan–gerakan dakwah di berbagai kampus di Indonesia pada tahun 1980an. PKS adalah partai dengan basis massa terbesar di Bali dan memiliki beberapa jaringan massa melalui beberapa yayasan. Partai Keadilan Sejahtera di Bali tidak terlalu berbeda dengan di daerah lainnya dimana muatan lokal sangat diperhatikan namun tetap didasari oleh nilai-nilai agama.

Visi misi dari partai keadilan Sejahtera (PKS) adalah ingin mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, adil, dan bermartabat. Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman yang berarti sebagai manusia terbebas dari rasa takut, dan secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi dimana sebagai manusia terbebas dari rasa lapar, dan secara fisik sejahtera. Adil berarti keadaan dimana entitas dan kualitas kehidupan dalam pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya diterapkan dengan proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melampaui batas. Kemudian mengawal reformasi sistem politik, birokrasi dalam pemerintahan, peradilan, dan militer yang memiliki komitmen untuk menguatkan demokrasi. Serta bersatupadu untuk menciptakan sebuah sistem tatanegara yang sesuai dengan kebijakan dan fungsi lembaga guna terciptanya proses *check and balance*.

PBB di Bali

Partai Bulan Bintang (PBB) lahir pada tahun 1998 sejak tanggal 17 Juli, pada awal deklarasinya Partai Bulan Bintang bertempat di Jakarta dan dimulai pada hari Jumat tanggal 26 Juli pada tahun yang sama di daerah halaman Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru di kota Jakarta. PBB di Bali bisa dibilang memiliki basis massa paling kecil dibanding Parpol Islam lainnya, jika dilihat antara hasil suara Pemilu dengan PKS, dan PPP, PBB memperoleh suara sangat jauh dibawah kedua partai tersebut.

PBB memiliki visi terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Menegakan keadilan dan kepastian hukum. Kemudian menjunjung tinggi konsep membela umat Islam, membela ulama, membela islam, membela masyarakat, dan Negara Indonesia. Selain itu Partai Bulan Bintang (PBB) ingin membangun bangsa beserta masyarakat Indonesia dengan karakteristik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, maju, mandiri, cerdas dengan pribadi yang baik, kemudian adil dan makmur, terakhir menjalankan demokrasi yang sesuai berdasarkan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak ketinggalan ikut mengawal untuk mewujudkan perdamaian dengan nilai-nilai Islam.

PPP di Bali

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah di deklarasikan pada 5 Januari 1973, PPP adalah hasil dari empat partai Islam yang bergabung menjadi satu, partai tersebut antara lain; Partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan terakhir Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dengan ketua sementara Mohammad Syafaat Mintaredja. PPP adalah partai dengan basis massa terbanyak kedua di Bali setelah PKS, namun basis masa tersebut tidak berpusat di Ibu Kota Denpasar melainkan kabupaten Jembrana.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki visi untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT. Beriringan dengan membangun Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, ditegakkannya hukum, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), dan tidak ketinggalan mengawal kemanusiaan yang berkiblat pada keadilan sosial yang dilandasi nilai-nilai Islami. Pentingnya fungsi agama Islam disini adalah sebagai petunjuk moral dan juga sumber ide-ide baru dalam kehidupan bernegara. Sementara misi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lain ingin mewujudkan dan mengawal manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta mengembangkan ukhuwah Islamiyah yang berbentuk persaudaraan antar sesama muslim.

Mobilisasi Politik Partai Islam di Bali

Menurut Stefano Bartolini ada tiga aspek yang dapat mempengaruhi terjadinya mobilisasi politik yaitu adanya mobilisasi massa, jaringan, dan ideologi. Mobilisasi massa menurut Stefano Bartolini dapat terjadi berdasarkan beberapa faktor, yang pertama adalah seberapa besar kemampuan dari sebuah organisasi tertentu untuk memobilisasi atau menggerakkan massanya dalam sebuah tujuan yang kolektif.

Kedua, perlu adanya jaringan atau relasi yang kuat dalam sebuah organisasi guna melebarkan sayap kepentingan maupun

menjaga hubungan diplomatis antar sesama organisasi.

Ketiga, ideologi yang menjadi kesamaan visi dari sebuah organisasi sangat penting untuk menentukan arah dari kepentingan yang ingin dicapai bersama dan menjadi dasar pemikiran organisasi tersebut. Terakhir pembilahan massa adalah sebagai bentuk diversifikasi kelas atau individu yang memiliki kepentingan berbeda dan menjadi pemicu terjadinya mobilisasi politik atas kepentingan tertentu.

Mobilisasi politik yang dilakukan oleh partai Islam di Bali belum efektif, mobilisasi politik tersebut dinyatakan gagal karena mobilisasi politik yang dilakukan partai tidak membuahkan hasil dalam Pemilu legislatif 2019. Partai Islam di Bali rata-rata memiliki pendanaan yang minim, menghasilkan struktur organisasi yang tidak lengkap, dan kantor DPW yang bahkan tidak ada atau sering berpindah, hal ini menjadi penghambat untuk terjadinya mobilisasi massa maupun sosialisasi partai kepada masyarakat secara luas.

Partai politik Islam di Bali butuh aktor kuat yang memiliki jaringan basis massa yang besar seperti Mudjiono selaku mantan ketua DPW PKS yang dimana selama masa jabatannya PKS selalu mendapatkan kursi di DPRD Kota Denpasar. PPP dengan basis massa yang berpusat di Jembrana juga memiliki tokoh kuat bernama Erfan Efendi sebagai ketua DPW. Basis massa para pemilih partai Islam di Bali kebanyakan berasal dari yayasan Islami seperti beberapa sekolah Islam di Kota

Denpasar dan beberapa pondok pesantren di kabupaten Jembrana. Partai politik Islam yang tidak memiliki tokoh dengan jaringan massa yang kuat menjadi sangat tertinggal dan hal tersebut terbukti dari hasil suara Pemilu yang sangat berbanding jauh dengan partai Islam lainnya seperti Partai Bulan Bintang.

Ideologi Partai Islam di Bali

Pos-Islamisme menurut Asef Bayat adalah pemikiran dalam bentuk kritik terhadap kemunduran pembangunan masyarakat muslim yang dilakukan oleh kalangan Islamisme. Menurutnya Pos-Islamisme adalah transformasi dalam Islamisasi, yang awalnya merujuk pada pembentukan negara Islam kini lebih merujuk pada pembentukan sikap kesalehan sosial, baik secara individu, kolektif, humanitarisme, dan deradikalisasi.

Partai PKS adalah partai yang mulai mengimplementasi teori Pos-Islamisme di Indonesia, karena dalam hal ini PKS dapat meleburkan antara visi misi dengan ideologi negara. Pada fenomena seperti ini sikap PKS lebih menekankan pada nilai-nilai substantif dalam ajaran Islam. Perihal gagasan-gagasan yang diusung oleh PKS tentang demokrasi, negara hukum, dan prinsip-prinsip kebangsaan itu sama dengan konsep Pos-Islamisme yang di jelaskan Asef Bayat. Ciri umum paham Pos-Islamisme tersebut cenderung pragmatis dan realis. Fenomena ini diperkuat dengan sikap PKS yang berusaha menegakkan kepedulian sosial

yang lebih mendalam untuk menciptakan dan meraih konstituen barunya dengan menolak isu-isu seperti mendirikan negara Islam dan menerapkam hukum Islam (Riadi, 2019).

Sementara itu berbeda dengan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang sampai saat ini bisa dinilai masih sangat mencerminkan partai Islamisme, selain karena didukung oleh NU, PBB mempercayai agama Islam sebagai sebuah sistem ketuhanan yang lengkap dengan model politik, kode budaya, struktur hukum, dan tatanan ekonomi yang superior singkatnya, sebuah sistem yang merespons semua permasalahan manusia. Partai Bulan Bintang juga berpendapat untuk tidak menjadikan negara Islam sebagai cita-cita partai namun hanya dalam kaidah hukumnya saja, pendapat ini belum bisa mencerminkan Pos-Islamisme yang dimana hukum Islam sebenarnya adalah konsep di dalam Islamisme dan hal ini yang ingin diubah oleh Pos-Islamisme menurut Asef Bayat. Selain itu berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terlihat persyaratan Partai Bulan Bintang untuk menjadi anggota maupun pemimpin masih belum memberikan ruang yang terlalu luas untuk masyarakat yang plural.

Partai Persatuan Pembangunan adalah sebuah partai politik yang sangat merepresentasikan Islamisme di dalamnya dengan menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi yang pemikirannya meliputi, sikap, kebijakan partai politik Islam, dan kader-kadernya harus bersumber dari ajaran-

ajaran Islam. Ideologi Islam dipercayai sebagai penuntun untuk mencapai tujuan politik, dengan begitu secara terus-menerus dilakukannya implementasi dan internalisasi nilai-nilai ideologi kepada semua kader beserta komponen partai lainnya untuk dapat mencapai tujuan dan cita-cita dari partai politik dalam berkehidupan berbangsa, dan bernegara di Indoneia.

Pembilahan Basis Massa di Bali

Pembilahan Basis massa menurut Stefano Bartolini adalah terbelahnya sebuah basis sosial yang biasa diakibatkan oleh konflik yang terjadi. Dalam konteks penelitian ini apakah pembilahan basis massa pemilih terjadi menjelang pemilu Legislatif di Kota Denpasar yang menyebabkan hasil suara dari berbagai partai politik Islam di Bali sangat rendah sehingga tidak ada Prapol Islam yang lolos DPRD dalam Pemilu Legislatif Kota Denpasar.

Menurut beberapa narasumber, konflik yang berasal dari internal parpol yang menyebabkan pembilahan basis sosial pemilih kerap terjadi. Seperti yang disampaikan oleh ketua DPW Partai Bulan Bintang bapak Muhammad Shalahuddin Jamil bahwa terpilihnya ketua umum yusril ihza mahendra sebagai kuasa hukum Joko Widodo menyebabkan terbelahnya para basis sosial dari Partai Bulan Bintang menjelang Pemilu 2019. Fenomena tersebut yaitu pilihan Ketua Umum Partai Bulan Bintang menyebabkan para basis sosial berupa organisasi Islam yang pada

awalnya sepakat untuk mendukung Paslon Capres Cawapres nomor urut dua menjadi terpecah menjadi dua kubu. Peristiwa ini juga menyebabkan perombakan struktur kepengurusan Partai Bulan Bintang setelah Pemilu.

Pembilahan karena konflik di dalam partai PKS juga pernah terjadi di tahun 2018, fenomena ini berawal dari konflik internal berupa rasa kekecewaan banyak pengurus PKS terhadap keputusan DPP PKS yang dinilai tidak demokratis. Peristiwa ini berujung pada pengunduran massal para kader dan pengurus PKS. Walaupun konflik ini tidak menyebabkan perolehan suara PKS di Bali turun, namun hal ini menyebabkan perubahan struktur organisasi secara besar-besaran. Dengan begitu mobilisasi politik partai jadi terhambat sampai struktur organisasi yang baru sudah di selesaikan.

Bapak Hizbulloh seorang muslim yang tergabung dalam Alumni Darul Istiqomah dan mantan guru di sekolah Al-banna yang yayasannya diketuai oleh Mudjiono menceritakan, bahwa di tempatnya mengajar dahulu banyak kerabat tenaga pengajar maupun yayasan yang menjadi Caleg ataupun pengurus partai. Namun setelah adanya konflik internal partai, para kerabat tersebut beberapa ada yang meninggalkan sekolah atau yayasan Al-banna dikarenakan sudah tidak satu pemikiran dengan lingkungan tempatnya bekerja. Hal ini dapat terlihat dari pindahnya kantor DPW PKS yang sebelumnya berada di depan sekolah Al-

banna dan sekarang beradaa di daerah Monang Maning.

Bapak Kusdian Kurniahadi sebagai Alumni organisasi Islam KAMMI dan Gatot Liefari sebagai Humas organisasi Islam Gemmar juga merasakan hal yang sama, mereka juga tidak pernah merasakan konflik dalam bentuk apapun diantara para penduduk Muslim dengan penduduk beragama yang lainnya di Bali. Namun tidak bisa dipungkiri konflik-konflik dari luar Bali maupun di dalam organisasi Islam masih dapat mempengaruhi orientasi para pemilih, seperti contohnya menjelang Pemilu presiden pada 2019 lalu. Kontestasi politik tersebut cukup memblah warga muslim yang memeluk aliran tertentu seperti NU dan Muhammadiyah menurut mereka.

5. SIMPULAN

Partai politik Islam di Bali merupakan partai politik minoritas yang membutuhkan pendekatan baru dalam menarik perhatian massanya. Partai Islam secara lembaga belum kuat menyebabkan hambatan verifikasi pada setiap Dapil, mobilisasi yang dilakukan melalui jalur dakwah seperti Liqo/Halaqoh belum efektif, jaringan organisasi sayap partai juga tidak aktif. Partai politik Islam di Bali sampai saat ini kebanyakan masih mengandalkan basis massa yang berasal dari yayasan-yayasan Islami seperti sekolah Islam dan Pondok pesantren yang tersebar di sekitar Bali dan didukung oleh tokoh penghubung yang kuat.

Partai Politik Islam di Bali masih sangat rawan konflik internal yang berujung pada

pembilahan basis massa para pemilih dan memecah ataupun mengalihkan suara partai politik Islam pada Pemilu Legislatif yang telah berlangsung. Fenomena ini menyebabkan terhambatnya partai politik Islam di Bali dalam berkontestasi dengan partai Nasionalis karena orientasi dari para pemilih beragama Islam yang masih terfragmentasi.

6. Saran

Dukungan kepada partai politik Islam masih banyak dikalangan masyarakat Islam di Bali, namun lemahnya partai politik Islam sebagai lembaga, menghambat dinamika parpol Islam untuk bisa berkembang kedepannya. Ideologi yang dibawakan juga sangat berpengaruh kepada cara pandang masyarakat terhadap politik, dengan begitu perlu lebih banyak edukasi mengenai pemikiran-pemikiran Islamisme dan pos-Islamisme kedepannya. Selain itu konflik internal yang terus terjadi di dalam partai kerap berujung pada terbilahnya basis sosial para pemilih Islam yang dimana fakta menunjukkan bahwa sangat berpotensi suara mereka dalam Pemilihan Umum Legislatif di Bali. Dengan itu Parpol Islam di Bali sangat perlu membenahi struktur kepartaiannya mulai dari segi kelembagaan agar dapat terus berkembang untuk kedepannya. Ideologi partai politik yang dibawakan juga harus tetap relevan yaitu sesuai dengan keadaan sosial politik yang ada saat ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifin, A. (2014). Politik Pencitraan Pencitraan Politik. Yogya: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, A. (2013). Partai Politik Islam Kenapa Kalah. Jakarta: Republika.
- Bartolini, S. (2007). The Political Mobilization of the European Left 1860-1980. New York: Cambridge University Press.
- Bayat, A. (2011). Pos-Islamisme. Yogyakarta : LKIS.
- Budiardjo, M. (2012). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixes. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Katz, R. S., & Crotty, W. (2014). Handbook Partai Politik. Bandung: Nusa Media.
- Lipset, S. M., & Rokkan, S. (1967). Cleavage structures, party systems, and voter alignments: an introduction. New York : Free Press.
- Luth, T. (1999). M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya. Jakarta: Gema Insani.
- Ratna, N. K. (2010). Metodologi Penelitian : Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rogers, E., & Storey, D. (1987). Communication Campaigns. Newbury Park: Sage.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, B. (2005). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana.
- Tebba, S. (2001). Islam Pasca Orde Baru. Yogja: PT. Tiara Wacana

Referensi dari internet:

AD/ART PBB. Diakses melalui https://jdih.kpu.go.id/data/data_parpol/AD%20ART%20PBB%202019.pdf. tanggal 10 januari 2021.

AD/ART PKS. Diakses melalui <https://pks.id/file/ad-art-pks>. tanggal 10 januari 2021.

Historia, Riwayat Islam di Bali. Diakses melalui <https://historia.id/agama/articles/riwayat-islam-di-bali-vv9Ql>. Tanggal 28 November 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kota Denpasar. (2020). Jumlah Umat Beragama di Kota Denpasar. Diakses melalui <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/artikel/jumlah-umat-beragama-di-kota-denpasar>. Tanggal 2 Februari 2020.

Ketetapan Muktamar Viii Partai Persatuan Pembangunan. Diakses melalui <https://infopemilu.kpu.go.id/download/verpol/119/ADART.pdf>. tanggal 10 Januari 2021.

KPU. (2019). Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia, hasil hitung suara DPRD provinsi Bali. Diakses melalui <https://pemilu2019.kpu.go.id>. Tanggal 11 November 2019.

PBB. Visi Misi Partai. Diakses melalui <https://partaibulanbintang.or.id/>. Tanggal 5 april 2020.

PKS. Visi Misi Partai. Diakses melalui <https://pks.id/>. Tanggal 5 april 2020.

PPP. Visi Misi Partai. Diakses melalui <https://www.petiga.or.id/visi-misi-ppp/>. Tanggal 5 april 2020.

Jurnal (Online) :

Bustomi. (2015). Kekuatan dari Partai Politik Islam, di Daerah Mayoritas Penduduk Muslim dalam Perolehan Suara Pemilu tahun 2014. Retrieved oktober 18, 2019, from repository.uinjkt.ac.id: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30715/1/BUSTOMI-FSH.pdf>

Fadillawati, E. (2013). Pencitraan Agama Pada Partai Politik Agama Islam di Ruang Publik Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera. Retrieved November 24, 2019, from Academia.edu: https://www.academia.edu/28722280/Pencitraan_Agama_pada_Partai_Politik_Islam_di_Ruang_Publik_Studi_Kasus_Partai_Keadilan_Sejahtera_1

Riadi, M.A. (2019). Post-Islamisme di Indonesia (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera). Retrieved Maret 27, 2020, from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48475/1/MOHAMAD%20ARIZA%20RIADI-FUF.pdf>

Romli, L. (2004). Partai Islam dan Pemilihan Islam di Indonesia. Retrieved November 18, 2019, from Ejournal Politik LIPI: <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/370/218>

Suteja, S. (2021). Aktor Penghubung dalam Modular Parties. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/76974/40958>

Tawakkal, G. T. (2009). Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilihan Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Demak 2009. Retrieved Desember 20, 2019, from http://daviddefendi.staff.umsida.ac.id/files/2013/04/GEORGE_TOWAR_IKBAL_TAWAKKAL-skripsi.pdf

Yuwita, H. (2018). Penurunan Jumlah Suara Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD di Kota Bekasi Tahun 2014. Retrieved oktober 18, 2019, from Repository.uinjkt.ac.id: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42919/1/HENI%20YUWITA-FISIP.pdf>

